

ABSTRAK

Raehan Athallariq Rifki, 1218010160, 2025 “Analisis Kinerja Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Pada Tahun 2023-2024”.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada tahun 2023 yang bertepatan dengan periode akhir masa jabatan anggota DPRD 2019-2024. Situasi ini menjadi krusial karena sebanyak 90,91% anggota Komisi B DPRD Kota Bandung mencalonkan diri kembali pada pemilu berikutnya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai potensi pengaruh kegiatan politik terhadap kinerja mereka. Selain itu, latar belakang pendidikan anggota yang beragam juga menjadi faktor yang berpotensi mempengaruhi efektivitas perumusan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Kompleksitas tantangan tersebut mendorong peneliti untuk menganalisis secara mendalam kinerja Komisi B sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang perekonomian dan keuangan selama masa transisi tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Bandung pada periode 2023-2024. Analisis kinerja ini menggunakan teori penilaian kinerja organisasi publik yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2002), yang diukur melalui lima dimensi utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, akuntabilitas, dan responsibilitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari informan kunci yaitu Ketua Komisi B, serta dua informan pendukung yaitu Analis Pengawasan dan Penyusun Risalah di Komisi B DPRD Kota Bandung. Keabsahan data diuji melalui triangulasi dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggota Komisi B DPRD Kota Bandung pada periode 2023-2024 secara umum sudah berjalan dengan baik pada empat dari lima dimensi. (1) Produktivitas dinilai berdasarkan kualitas dan substansi dampak kinerja, bukan sekadar kuantitas produk legislasi. (2) Responsivitas terbukti melalui kemampuan proaktif dalam menjangkau aspirasi dan menerjemahkannya menjadi program-program yang solutif. (3) Kualitas Kinerja dijaga melalui kerangka kerja yang sistematis dan berbasis bukti, seperti penggunaan Naskah Akademik dalam legislasi dan verifikasi data dalam pengawasan. (4) Akuntabilitas terbangun melalui sistem transparansi digital yang terstruktur, mekanisme pelaporan formal, serta pertanggungjawaban langsung kepada konstituen. Namun, pada (5) Responsibilitas, ditemukan tantangan terkait tingkat partisipasi anggota dalam forum-forum resmi yang belum optimal, yang lebih disebabkan oleh kendala struktural seperti jadwal yang tumpang tindih antar Alat Kelengkapan Dewan (AKD) daripada kurangnya komitmen individual.

Kata Kunci: Kinerja, DPRD, Komisi B, Perekonomian dan Keuangan